

Jokowi Sebut Hak Mahfud MD Mundur sebagai Menko Polhukam

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai keputusan Mahfud MD yang akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Menurut Jokowi, keputusan tersebut merupakan hak Mahfud MD.

"Itu haknya dan saya sangat menghargai," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD sebelumnya menyatakan akan melepas jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk menghindari *conflict of interest* atau konflik kepentingan dalam Pemilu 2024.

"Baik tolong dengarkan baik-baik semuanya, apa yang disampaikan Pak Ganjar adalah kesepakatan

saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik baik, jadi tidak ada pertentangan antara saya dan Pak Ganjar," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Kafe Borjuis, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (23/1).

Mahfud juga ingin memberikan contoh bagi pejabat-pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik sekaligus merangkap tim sukses paslon tertentu.

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, dan saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di polhukam secara rutin, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya meskipun saya cawapres," kata Mahfud. • han

KPK Serahkan 127 Bukti ke Hakim Gugatan Praperadilan Eddy Hiarij

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan bukti melawan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiarij atau Eddy Hiarij atas penetapan tersangka suap dan gratifikasi. Ada 127 bukti berupa dokumen yang diserahkan.

"Jadi kita menyerahkan 127 berkas ke hakim untuk pembuktian, (berkasnya apa saja) seputar perkara ini," kata Anggota Tim Biro Hukum KPK, Muhammad Hafez, usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut Hafez, KPK sudah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Eddy sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap Eddy sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Ya kita optimis sudah memenuhi bukti permulaan untuk menetapkan tersangka. Sudah firm, sudah sesuai dengan SOP, bukti formal juga sudah cukup," lanjutnya. • mei

Sementara itu, kuasa hukum Eddy Hiarij, Muhammad Luthfie Hakim, mengatakan, pihaknya menyerahkan 121 bukti berupa dokumen.

Dia menyebut dokumen itu yang menunjukkan prosedur pelaksanaan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah.

"Yang kami serahkan adalah bukti-bukti yang menguatkan posita atau dalil-dalil yang kami ajukan dalam permohonan. Misalnya seperti sprindik, kemudian dimulainya penyidikan, kemudian penyitaan, masih begitulah," ujar Muhammad Luthfie Hakim.

"Kalau kemudian dari pihak mereka (KPK) lebih banyak, ya tentu saja, karena akan semuanya sebenarnya alat surat kita dari tangan mereka," kata Muhammad Luthfie Hakim.

Sidang praperadilan Eddy akan kembali digelar pada Kamis (25/1). Agenda sidang masuk ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dari pemohon dalam hal ini pihak Eddy. • mei

Forum Habaib Se-Jabar Mantap Dukung Paslon Ganjar-Mahfud

BANDUNG (IM) - Forum Habaib se-Jawa Barat (Jabar) deklarasi dukungan untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Deklarasi dilakukan di Pondok Pesantren Manbaul Falah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (23/1).

"Karena dari hati nurani, *truck record*-nya terus dari perjalanannya (karier kepemimpinan), yang selama ini mendukung masyarakat-masyarakat yang ada di bawah. Khususnya, para ustadz dan guru-guru mengaji di kampung," kata salah seorang pengurus Samawi, Hardi Prabowo.

Dia menyebutkan pengurus dan anggota Samawi yang mengikuti deklarasi dukungan kali ini, berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat khususnya wilayah Bandung Raya.

"Kepengurusan Samawi Bandung Raya, terus pengurusan dari (berbagai daerah di) Jawa Barat. Ada lagi dari tokoh-tokoh alim ulama dan para habaib se-Jawa Barat," ujar Hardi merinci.

Pengaruh besar para

pengurus Samawi yang mengikuti deklarasi kali ini diyakini akan mampu menarik dukungan dari para pengurus lainnya di wilayah Jawa Barat maupun Indonesia secara keseluruhan.

"Tatkala sudah berbelok haluan (mendukung Ganjar-Mahfud), insya Allah pengurus Samawi lainnya di kalangan bawah siap mendukung kemenangan Ganjar-Mahfud," tutur Hardi.

Selain lewat deklarasi, dukungan mereka ditunjukkan lewat aksi doa bersama untuk kemenangan Capres-Cawapres bernomor urut tiga, Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Para ulama dan habaib sekaligus mendoakan agar Ganjar-Mahfud lebih memperhatikan seluruh rakyat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden-Wakil Presiden 2024-2029 mendatang.

"Memperhatikan guru-guru mengaji yang ada di kampung. Lebih memperhatikan kalangan-kalangan yang ada di bawah, khususnya yang ada di pondok pesantren dan semua umat," ujarnya. • mei

PENGUMUMAN

PT. KENCANA PROPERTI BUANA, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") merencanakan mengalihkan sebagian besar saham dalam Perseroan kepada pembeli. Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) dan ayat (8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kreditor yang keberatan atas rencana diatas dapat mengajukan keberatan tertulis selambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal Pengumuman ini disertai alasan dan bukti ke : Sudirman Plaza, Plaza Marein Lantai 11, Jl. Jend Sudirman Kav. 76-78, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12910.

Jakarta, 25 Januari 2024
Direksi Perseroan

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



KUNJUNGAN MENKO PEREKONOMIAN DI INDRAMAYU

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto (kedua kanan) menyerahkan Kredit Usaha Rakyat kepada bakul ikan di desa Eretan Kulon, Kandanghaur, Indramayu, Jabar, Rabu (24/1). Dalam acara tersebut Airlangga juga memberikan bantuan beras kepada Penerima Bantuan Pangan dan meninjau tanggul penahan abrasi di daerah tersebut.

SURVEI INDIKATOR

Kejagung Lembaga Penegak Hukum yang Paling Dipercaya Publik

Tingginya kepercayaan publik terhadap Kejaksaan lantaran dinilai tegas menindak oknum-oknum di jajarannya yang melanggar aturan.

JAKARTA (IM) - Kejaksanaan Agung (Agung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik berdasarkan survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, Kejaksanaan mendapat kepercayaan 76,2%. Kemudian, Poli 75,3% serta Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) 70,3%.

Survei itu dilaksanakan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024 dengan melibatkan 4.560 responden, yang ditentukan secara *stratified random sampling*. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pakar hukum pidana Uni-

versitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho mengatakan, tingginya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap Kejaksaan tidak semata-mata kinerja dalam penanganan suatu perkara hukum. Namun, ketegasan menindak oknum jajarannya yang menyimpang.

"Ini saya kira, *trust* ke depan (terbangun karena tegas terhadap oknum internal) yang harus dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, tidak ada ampun kepada internal SDM yang melakukan sesuatu pelanggaran-pelang-

garan," katanya dalam survei Indikator Politik Indonesia tentang "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik", Selasa (23/1).

Hibnu berpendapat demikian karena publik akan melihat aparat tidak menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*qual before the law*) jika tidak tegas menindak oknum internal yang melakukan pelanggaran.

"Masyarakat itu (akan menilai) penanganan yang tidak equal. Ketika penanganan keluar itu optimal, tapi juga penanganan-penanganan SDM internal juga harus betul-betul firm. Sehingga, tidak ada kera-

guan dalam suatu penanganan perkara, betul-betul *zero tolerance*," kayanya.

Hibnu lantas membandingkan kinerja masing-masing lembaga penegak hukum ketika menangani perkara yang berkaitan dengan internal masing-masing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkapnya, cenderung lamban dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik pegawainya atau pimpinannya.

"Polisi kadang-kadang hanya dicopot. Tapi, kejaksaan, baru ada dugaan (jajarannya melakukan pelanggaran), langsung ambil (sikap tegas)," jelasnya. • han

Kelompok Gema Pelaut Amin Targetkan Lima Juta Suara untuk Anies - Cak Imin

JAKARTA (IM) - Gerakan Maritim Pejuang Laut Anies Muhaimin (Gema Pelaut AMIN) mendeklarasikan diri untuk memenangkan pasangan calon presiden (Capres) Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.

Mereka menargetkan 5 juta suara dari kelompok maritim untuk AMIN di pemilihan presiden pada 14 Februari 2024.

Deklarasi itu dilakukan di Rumah Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Pangeran Diponegoro No 10, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi itu turut hadir Dewan Pakar Timnas AMIN Supomo.

Koordinator Forum Perjuangan Anies-Muhaimin (Forju AMIN) Pusat, Winston Herlanjaya, menyebut Gema Pelaut AMIN terdiri dari kelompok nelayan, petani garam, pembudidaya lobster, pengusaha galangan

kapal, dan asosiasi lain di bidang maritim. Winston mengatakan pihaknya menargetkan lima juta suara untuk Anies dan Cak Imin dari kelompok maritim usai deklarasi dukungan dari Gema Pelaut AMIN.

"Gema Pelaut AMIN ini bisa support suara. Saya bisa berkata, rata-rata bisa support lima juta suara. Kalau dapat suara 90 persen sudah luar biasa. Harapan kita 14 Februari, suara AMIN itu insyaallah satu putaran," kata Winston saat acara deklarasi, Rabu (24/1).

Sementara itu, Ketua Gema Pelaut AMIN Rusdianto Samawa menyampaikan dukungan diberikan usai membaca visi dan misi dari pasangan AMIN.

Dia menyebut sepakat dengan program agromaritim dari AMIN.

Dia pun kembali men-

egaskan bahwa Gema Pelaut AMIN akan memberikan lima juta suara dan satu juta saksi untuk mengawal suara di TPS.

"Kita bergabung ini bukan kosong, ini adalah gerbong yang sangat besar dan kami berjanji dalam deklarasi ini kami akan sumbangkan satu juta saksi di semua TPS dan gerakan 5 juta suara pilih AMIN," katanya.

"Ini bukan gerbong yang bapak bawa, tapi kapal induk yang bapak bawa dengan lima juta pemilih, dan satu juta saksi itu luar biasa. Ini potensi perubahan yang tak pernah kita bayangkan. Kami membuka pintu seluas-luasnya untuk kita sambut. Mari bergabung. Kalau tidak, menyesal. 20 hari lagi Indonesia berubah, amin. Yang ubah kita sendiri, perubahan tak bisa dicegah," katanya menambahkan. • han



MENTERI ATR/BPN BAGIKAN SERTIFIKAT TANAH

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kanan) menyerahkan sertifikat tanah kepada warga di Leuwimalang, Kota Tasikmalaya, Jabar, Rabu (24/1). Sebanyak 40 sertifikat tanah dibagikan kepada warga dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan ditargetkan sebanyak 337.000 sertifikat tanah di wilayah Kota Tasikmalaya masuk dalam program PTSL.

Prabowo-Gibran Berkomitmen Penuh untuk Mempercepat Capaian NZE

JAKARTA (IM) - Komandan Tim Komunikasi Bravo Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djihadwono, menegaskan, pasangan calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibra Rakkubuming Raka, berkomitmen penuh mempercepat capaian Net Zero Emission (NZE) atau nol emisi karbon gas rumah kaca (GRK).

Prabowo-Gibran jika terpilih pada Pilpres 2024, akan mengambil sejumlah langkah sigap, termasuk penurunan jejak karbon dan air serta penggunaan bioplastik.

"Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan kita memiliki target (mencapai) nol emisi pada 2060. Pada 2024, (negara) kita memiliki target untuk mengurangi emisi sebesar 31,89 persen," ucap Budisatrio dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (24/1).

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) itu menegaskan, Prabowo-Gibran memiliki komitmen penuh untuk memenuhi target tersebut.

Budisatrio sebetulnya menyoroti bahwa isu lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang diusung oleh paslon nomor urut 2 tersebut.

"Komitmen dalam melestarikan lingkungan hidup dengan mempercepat capaian pengurangan emisi adalah prioritas. Hal ini tercakup dalam visi-misi program prioritas nomor 11. Tujuan besarnya adalah untuk menjamin

generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman," jelas Budisatrio kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/1) lalu.

Budisatrio menjelaskan bahwa upaya percepatan pencapaian target nol emisi gas rumah kaca akan difokuskan pada penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) dalam berbagai produk dan aktivitas.

Prioritas utama adalah mengurangi emisi dari jejak karbon kegiatan manusia, yang memerlukan kebijakan dan edukasi.

"Pembiasaan menggunakan kendaraan umum, kendaraan listrik yang lebih rendah emisi bisa jadi pilihan. Termasuk juga proses industri makanan dan berbagai produk dengan rantai karbon yang panjang. (Hal ini) memang butuh keberpihakan," jelas Budisatrio.

Di samping itu, ia juga menyoroti penggunaan bioplastik sebagai langkah spesifik dalam mengatasi masalah sampah plastik yang masih tinggi, yang juga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca.

"Terkait hal ini dalam visi dan misi Prabowo-Gibran bahkan dituliskan secara khusus mengenai (upaya) percepatan penggunaan bioplastik sebagai alternatif pengganti plastik. (Hal) ini juga bertujuan untuk mengurangi emisi," katanya.

Budisatrio menjelaskan bahwa langkah-langkah percepatan tersebut juga akan diwujudkan melalui peningkatan pengelolaan tanah, air, dan hutan secara lestari.

Pasalnya, emisi karbon terbesar di Indonesia berasal dari sektor kehutanan dan pertanian. • han